

**TINJAUAN ATAS AKUNTANSI PENYUSUTAN ASET TETAP PADA  
KANTOR WILAYAH DJBC KHUSUS KEPULAUAN RIAU  
TAHUN 2017-2018**

**TUGAS AKHIR**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan  
Pendidikan Program Diploma 3**

**OLEH:**

**RAJALI FAUZI ASYHARI LUBIS**  
**NIM: 195402025**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI POLITEKNIK  
MANDIRI BINAPRESTASI MEDAN  
2021**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara kepulauan terbesar di seluruh dunia yang memiliki wilayah perairan sangat luas, salah satu wilayah perairan Indonesia adalah selat malaka yang merupakan sebuah selat yang terletak di antara Semenanjung Malaysia (Thailand, Malaysia, Singapura) dan Pulau Sumatra, Indonesia (Aceh, Sumatra Utara, Riau & Kepulauan Riau). Selat Malaka merupakan salah satu jalur pelayaran terpenting di dunia, sama pentingnya seperti Terusan Suez atau Terusan Panama. Selat Malaka membentuk jalur pelayaran terusan antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik serta menghubungkan tiga dari negara-negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia: India, Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok. Sebanyak 50.000 kapal melintasi Selat Malaka setiap tahunnya, mengangkut antara seperlima dan seperempat perdagangan laut dunia. Demi menjaga kestabilan komoditas-komoditas kebutuhan bangsa Indonesia dari penyelundupan barang ilegal, maka terbentuk suatu unit instansi pemerintah yang terletak di semenanjung malaka yang fokus utamanya pengawasan terhadap keluar masuknya barang ataupun melakukan pencegahan dan/atau penegakan terhadap sarana pengangkut laut yang diduga melakukan pelanggaran kepabeanan dan cukai.

Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau merupakan salah satu bagian dari Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terletak di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Selain itu, Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau diberikan tambahan nama istimewa “Khusus” dikarenakan fokus utamanya adalah pengawasan wilayah daerah pabean perairan laut sangat luas yaitu seluruh semenanjung

utara pulau Sumatera mulai dari ujung barat Aceh sampai dengan wilayah bagian Barat pulau Kalimantan dan mempunyai Instansi Vertikal *Supporting Unit* terbesar di Indonesia dalam pengawasan patroli laut yaitu Pangkalan Sarana Operasi Tipe A Tanjung Balai Karimun yang menyediakan sarana operasi berupa kapal patroli termasuk anak buah kapal bagi pelaksanaan tugas pengawasan, penindakan dan intelijen kepabeanaan dan cukai.

Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau diberikan wewenang dan tugas yang besar tersebut memerlukan dukungan Sarana Prasarana berupa Aset tetap begitu banyak dan beragam yang digunakan pada saat mulai persiapan patroli laut sampai dengan pasca patroli laut serta bila saat tugas pengawasan patroli laut tersebut dilakukan pencegahan. Disamping itu, Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau juga memiliki aset tetap lain yang mendukung proses bisnis berjalannya suatu instansi pemerintah. Lebih lanjut, dalam hal pengembangan pegawai DJBC sering diadakan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang berhubungan dengan Penindakan dan Penyidikan serta patroli laut oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Kementerian Keuangan di Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau. Hal ini dikarenakan memiliki Sarana Prasarana yang cukup lengkap dalam uji praktik langsung dan juga memiliki *Mess* 3 lantai sebanyak 4 (empat) buah yang digunakan peserta Diklat untuk menginap.

Berdasarkan data dan penjelasan tersebut, maka diperlukan pengelolaan aset tetap yang sistematis, terstruktur dan masif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah demi terwujudnya laporan yang baik dan benar. Entitas dalam pengelolaan aset tetap Pemerintah harus memiliki kemampuan mengelola aset-aset tetap pemerintah sesuai standar akuntansi dan kegunaan fisiknya demi terlaksana tugas dan fungsinya. Beberapa pengelolaan aset

tetap berupa penggunaan, pemanfaatan, pertukaran, pelepasan, dan penghapusan aset tetap memerlukan informasi nilai wajar aset tetap yang digunakan untuk pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Dalam rangka memperoleh informasi nilai wajar atas aset tetap tersebut, pemerintah dapat melakukannya dengan metode penyusutan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang standar Akuntansi Pemerintah “Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan”.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertarik untuk menulis karya tulis yang berjudul “Tinjauan atas Akuntansi Penyusutan Aset Tetap pada Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau tahun 2017-2018”. Berdasarkan Karya Tulis ini, penulis berharap memperoleh banyak ilmu implementasi di lapangan serta penulis berharap agar dapat memberikan saran dan masukan yang dapat bermanfaat untuk Pengelolaan Aset tetap pemerintahan.

## **1.2. RumusanMasalah**

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas maka yang menjadi permasalahan dalam Tugas Akhir ini adalah “Bagaimana Tinjauan atas Akuntansi Penyusutan Aset Tetap pada Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau tahun 2017-2018 ?”.

Lingkup pembahasan pada Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah Kegiatan Akuntansi Penyusutan Aset Tetap yang dilaksanakan pada Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau periode tahun 2017-2018. Pembahasan tersebut dimulai dari kebijakan, penerapan, pencatatan penyajian dan pengungkapan Akuntansi Penyusutan Aset Tetap pada Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau sesuai peraturan dan teori

terkait.

### **1.3. TujuanPenulisan**

TujuanyangingindicapaiolehpenulisdalampenyusunanKaryaTulisTugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kebijakan akuntansi tentang pengakuan, pencatatan dan penyajian penyusutan aset tetap pada Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau.
2. Untuk mengevaluasi kebijakan akuntansi terkait pengakuan, pencatatan dan penyajian penyusutan aset tetap pada Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau berdasarkan peraturan yang berlaku.
3. Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman bagi penulis, baik secara teori maupun praktik atas pelaksanaan akuntansi penyusutan aset tetap pemerintah yang terjadi di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau.

### **1.4. ManfaatPenelitian**

1. Bagi pembaca, sebagai bahan acuan dan sumber informasi untuk menambah wawasan dan pemahaman tentang akuntansi penyusutan aset tetap pada Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau Tahun 2017-2018.
2. Bagipenulis,dapatmenambahpengetahuantentangakuntansipenyusutanaset tetap dan sebagai bahan masukan jika suatu saat Penulis dihadapkan pada masalah yang berhubungan dengan akuntansi penyustan aset tetap.

3. Bagi perusahaan bermanfaat sebagai bahan pertimbangan untuk penilaian sejauh mana penerapan penyusutan akuntansi aset tetap yang sesuai dengan peraturan.
4. Bagi pihak Politeknik MBP sebagai bahan bacaan dan tambahan informasi serta relevansi bagi mahasiswa yang akan menyusun laporan yang ada kaitannya dengan penulisan tugas akhirini.